



SENIN, 28 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
x	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penataan Aset Akan Dilakukan Secara Bertahap

RBI, BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah mengatakan, persoalan aset bukan hanya terjadi di Provinsi Bengkulu. Tetapi juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Karena persoalan aset selalu menjadi pembahasan setiap tahunnya ditingkat pemerintah daerah dan DPRD. Sebab itu Rohidin memastikan penataan aset akan dilakukan bertahap secara baik di Bengkulu.

"Ada asetnya tapi sertifikatnya tidak ada. Ada sertifikat, tapi asetnya tidak jelas. Ada juga aset dan sertifikatnya ada, tapi nilai ekonominya belum pasti. Maka sekali lagi saya katakan, mengakumulasi ini sudah 50 tahun dan agenda persoalan aset bukan saja di Bengkulu saja, terutama aset yang dipinjam pakai," ungkap Rohidin.

Ditegaskan Rohidin, saat ini Pemerintah



Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah foto bersama IOF Bengkulu

IWAN/RBI

Provinsi Bengkulu sedang melakukan penataan aset secara maksimal. Mulai dari aset yang pinjam pakai sampai aset lain-lainnya milik daerah.

"Semuanya kita inventarisir. Baik itu surat menyurat hingga asetnya. Karena tidak bisa kita bicara aset jika surat menyuratnya itu

tidak ada. Sebaliknya, demikian. Karena kita bicara aset harus ada surat-suratnya," terang Rohidin.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Mulyadi Usman mengatakan, pihaknya menilai sangat perlu dilakukan inventarisir aset seperti Mess Pemda.

Menurutnya, inventarisir penting dilakukan karena berdasarkan informasi yang pihaknya terima bahwa aset Mess Pemda itu total luasnya mencapai 8 hektar. "Kalau kita melihat lahan yang menjadi lokasi berdirinya gedung Mess Pemda, hanya sebagian dari total luas lahan," kata

Mulyadi.

Oleh karena itu, lanjut Mulyadi, perlu dilakukan inventarisir aset secara pasti. Sehingga setelah dilakukan lelang, tidak muncul persoalan dikemudian harinya. "Dengan diinventarisir, bisa diketahui secara pasti total luas lahan 8 hektar itu batasnya bagian mana saja. Kemudian bangunan apa saja yang telah berdiri di atas lahan selain gedung Mess Pemda," terangnya. Ditambahkan

Mulyadi, penataan aset harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari aset pinjam pakai hingga aset bergerak dan tidak bergerak. "Ya semua, tidak boleh hanya aset ini atau hanya aset itu saja. Kemudian cari surat menyurat semua aset yang dimiliki. Lantaran ada diantara aset daerah itu suratnya sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada surat menyuratnya, bagaimana bisa mengakui itu sebagai aset daerah," tutupnya. (idn)